

REFERENSI

- Akbar, Rusdi, Robyn Pilcher, dan Brian Perrin. 2012. "Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government". *Pacific Accounting Review*, Vol. 24, No. 3, pp. 262-291.
- BPKP. 2011. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, VI. ed.
- Braun, Virginia dan Victoria Clarke. 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology". *Qualitative Research in Psychology*, Vol 3 (2), pp. 77-101.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design*, 4th ed. Sage Publication Ltd.
- DiMaggio, P.J. dan W.W. Powell. 1983. "The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields". *American Sociological Review* Volume 48, page 147-160.
- Elfrida. 2014. "Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi". Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. Washington: Sage.
- Hood, C., 1991. "A Public Management For All Seasons". <http://evalrbkunwas.menpan.go.id>
- Kabupaten Wonogiri. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010--2015*.
- Kabupaten Wonogiri, 2015. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2014*.
- Kabupaten Wonogiri. 2016. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2015*.
- Kabupaten Wonogiri, 2016. *Wonogiri dalam Data 2016*. Bappeda Kabupaten Wonogiri.
- Knowlton, Lisa Wyatt dan Cynthia C Phillips. 2013. *The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Result*, 2nd Edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

- LAN&BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: LAN RI.
- LAN&BPKP, 2000. *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Modul 4 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: LAN RI.
- LAN&BPKP, 2000. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Modul 3 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: LAN RI.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Osborne, D. dan T. Gaebler. 1993. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Penguin Group.
- Qurrotulaini. 2015. "Evaluasi dan Strategi Peningkatan Kinerja Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY". Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 1998. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*. Negara Republik Indonesia.
- _____. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Negara Republik Indonesia.
- _____. 2003. *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Negara Republik Indonesia.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Negara Republik Indonesia.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Negara Republik Indonesia.
- _____. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Negara Republik Indonesia.
- _____. 2007. *Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Negara Republik Indonesia.

_____. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Negara Republik Indonesia.

_____. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Negara Republik Indonesia.

_____. 2014. *Peraturan Menpan dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Negara Republik Indonesia.

_____. 2015. *Peraturan Menpan dan RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Negara Republik Indonesia.

Sari, I.P. 2015. "Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sleman)". Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

The Tokyo Declaration of "Guidelines on Public Accountability". 1985.